

PENOLAKAN PEMERINTAH TURKI DI BAWAH *ADALET VE KALKINMA PARTISI* (AKP) TERHADAP KUDETA MILITER MESIR TAHUN 2013

(*THE REFUSAL OF TURKISH GOVERNMENT BY ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP) AGAINST THE MILITARY COUP OF EGYPT IN 2013*)

Ahmad Mas'udi Budiana.
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember 68121
e-mail: ahmad91masudi@gmail.com

Abstract

Turkey has entered a new era since Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) won the general elections and governed the country in 2002. Since then, the value of democracy is growing and developing in Turkey. In addition, Turkey also changed its foreign policy which was previously directed to Western countries to be inclined to the regions around Turkey. The change in Turkey's view were known as Strategic Depth and Zero Problem. Cases that describe the political turnaround can be seen from Turkey's attitude towards the Egyptian military that forced the president of Egypt Mohamed Morsi to step down from his position in 2013. Turkey called the attempt made by the Egyptian military a form of military coup. In the rules of democracy, a military coup is a behavior that cannot be justified. In that case, Turkey rejected and opposed the military coup of Egypt. It does not mean that the attitude shown by Turkey was without reason. Turkey saw this incidence from the internal and external perspectives.

Keywords: Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), Egypt's military coup, democracy

PENDAHULUAN

Pada tahun 2002, *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (partai AKP) memenangkan pemilu di Turki. Sejak saat itu, Pemerintahan Turki dipimpin dan didominasi oleh kalangan kader AKP. Secara perlahan, kebijakan luar negeri Turki berubah orientasi. Ada sikap tidak biasa yang dimainkan oleh Turki. Turki secara perlahan menarik kedekatan dengan Negara-negara Barat. Turki merubah doktrin politik luar negerinya menjadi konsep *Strategic*

Depth dan Zero Problem, yaitu strategi kebijakan dengan memanfaatkan kelebihan Turki baik secara geografi, budaya serta pengaruh sejarah sebagai alat Turki dalam berinteraksi dalam kancah dunia Internasional (Tashjian, 2012: 8).

Salah satu perubahan sikap Turki yang dapat diamati yaitu sikap Turki terhadap kudeta militer Mesir tahun 2013. Pada kudeta tersebut, Turki segera mengeluarkan sikap tegas, Turki menolak dan menentang kudeta. Penolakan dan penentangan oleh

Turki justru di tengah negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Australia, Arab Saudi diam dan belum menentukan sikap. Turki menilai bahwa kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir dapat menodai dan merusak nilai demokrasi yang selama ini selalu diperjuangkan oleh negara Barat dan Timur, terlebih budaya demokrasi di Mesir masih dalam fase awal. Budaya demokrasi baru tumbuh bermula dari penggulingan Presiden Husni Mubarak tahun 2011. Nilai demokrasi yang masih berumur jagung tersebut masih perlu pengawalan dari berbagai pihak untuk mewujudkan negara yang demokratis. Dalam negara yang demokratis suatu keputusan tidak bisa diubah atau dibatalkan kecuali dengan cara demokratis pula. Suara atau aspirasi rakyat sangat menentukan pilihan negara. Cara kudeta militer sangat tidak dibenarkan dalam proses demokratisasi karena akan merusak nilai demokrasi.

Perdana Menteri Erdogan mengecam keras tindakan militer Mesir yang mengintervensi perpolitikan Mesir. Penolakan Turki tidak bisa dilepaskan dari sejarah Turki di masa lalu. Ia menyatakan bahwa kudeta akan membawa akibat yang sangat berat bagi rakyat dan juga akan memperburuk keadaan dalam negeri baik dari ekonomi ataupun kesejahteraan rakyat.

Perdana Menteri Erdogan selain mengecam kudeta juga mengecam tindakan militer Mesir yang sangat represif dalam menghadapi pendukung Mursi yang mengakibatkan jatuh korban kurang lebih menewaskan 638 orang dan melukai 4.000 orang

pada hari Rabu 14 Agustus 2013 (Ariefyanto, 2013). Penolakan Perdana Menteri Erdogan tidak hanya disampaikan melalui pidato resmi kenegaraan melainkan juga pada pidato-pidato di berbagai daerah dalam negeri maupun ketika melakukan kunjungan ke luar negeri seperti di Rusia dan PBB (Tim Redaksi, 2013 a). Pada pidato di majelis umum PBB Erdogan menyatakan kesangsiannya terhadap legitimasi Abdul Fattah As-Sisi sebagai Presiden Mesir (Tim Redaksi, 2014).

Menanggapi kritikan dan kecaman yang terus dilakukan oleh Perdana Menteri Erdogan akhirnya Mesir mengusir Duta Besar Turki yang berada di Mesir. Begitu juga dengan Turki, Turki mengusir duta besar Mesir yang bertugas di Turki. Artinya duta besar kedua negara sama-sama mendapatkan *persona non grata*. Akhirnya kedua negara memutuskan hubungan diplomatik dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Cara represif yang terjadi di Mesir dalam rangka penurunan Presiden Mursi bukan yang pertama kali terjadi di Mesir. Sebelumnya cara represif juga terjadi di Mesir seperti pada proses revolusi Mesir pada tahun 1952, dan penggulingan Husni Mubarak dari Presiden Mesir tahun 2011. Setiap kali terjadi peristiwa tersebut, tidak ada ketegangan hubungan antara Turki dengan Mesir.

Fenomena kebijakan Turki menolak dan menentang kudeta militer Mesir tahun 2013 ini menarik untuk diteliti karena telah beberapa kali Mesir mengalami pergolakan politik dengan cara

represif. Namun demikian, dalam setiap peristiwa tersebut, hubungan politik dan kerjasama antara Turki dan Mesir tidak mengalami ketegangan. Bahkan ketika Husni Mubarak (Presiden Mesir) digulingkan, Turki sepenuhnya mendukung tindakan tersebut dan pasca penggulingan, Turki siap memberikan bantuan dan dukungan kepada Mesir untuk mewujudkan negara yang demokrasi. Pada tulisan ilmiah ini, akan dikaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah Turki dalam menolak atau menentang kudeta militer di Mesir pada tahun 2013.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) dari Richard C. Snyder yang meneliti suatu pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah suatu proses yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Richard C. Snyder menyebutkan adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan (Snyder *et.al.*, 1962: 203). Teori ini dipilih karena sesuai dalam membantu mengurai dan menganalisis permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Teori Pembuatan Keputusan

Menurut Richard C. Snyder, dalam menganalisis suatu kebijakan luar negeri suatu negara, hal utama yang harus diamati yaitu proses pengambilan

keputusan. Keputusan yang diambil pada akhirnya merupakan satu titik tolak dari suatu negara untuk memulai kebijakannya baik di dalam negeri maupun terhadap negara lain.

Asumsi dasar teori pengambilan keputusan Richard C. Snyder yaitu bahwa segala tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pelaku politik domestik, dimana para pemimpin negara (baik secara individu ataupun kelompok) bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan (Jensen, 1982: 7). Teori pengambilan keputusan Richard C. Snyder menunjukkan bahwa faktor apapun yang bersinggungan dengan politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*). Pembuat keputusan adalah orang yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan tersebut, sehingga untuk memahami suatu keputusan perlu melihat siapa pembuat keputusan tersebut (Snyder *e.al.* dalam Varma, SP, 2010: 392).

Richard C. Snyder menjelaskan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peran kepemimpinan, persepsi, arus informasi yang didapat, dampak dari kebijakan luar negeri dan sistem kepercayaan para pembuat keputusan merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh suatu negara. Teori Richard C. Snyder juga

mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya, apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis ataupun beresiko (Perwita dan Yani, 2005: 64).

Teori Richard C. Snyder menyatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. Faktor-faktor internal sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri seperti lingkungan non-manusia (kondisi politik/pemerintahan), lingkungan manusia berupa masyarakat, penduduk dan kebudayaan. Faktor internal berupa struktur serta perilaku sosial berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pertimbangan yang lain yaitu faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain lingkungan non-manusia (kondisi politik/pemerintahan), budaya-budaya luar, masyarakat luar dan tindakan pemerintah lainnya dalam hal ini tindakan negara lain.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal, para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri. Artinya, sebelum memutuskan suatu kebijakan suatu negara terlebih dulu mempertimbangkan tiga hal yang

mengiringinya, yaitu *perception* (tanggapan awal), *choice* (pilihan) dan *expectation* (harapan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dipilih yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Metode tersebut memungkinkan penulis untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji argumen utama, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.

Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada obyek penelitian seperti: perilaku, motivasi dan tindakan. Sedangkan data yang diolah dalam metode ini adalah data yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian baik yang berupa dokumen maupun pernyataan. Unit analisa dalam penelitian ini adalah keputusan negara Turki menolak kudeta militer Mesir pada tahun 2013, sehingga dalam pembahasannya melibatkan negara Turki dan Mesir. Sementara itu, data-data yang diolah didapat dari berbagai macam sumber, seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar online, situs web dan sumber-sumber lainnya yang menyediakan informasi terkait.

HASIL PENELITIAN

Penolakan Pemerintah Turki di bawah *Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP)* terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013

Penolakan Pemerintah Turki berawal dari persepsi partai AKP, yaitu partai pemenang pemilu di Turki. Persepsi Pemerintah Turki di bawah AKP terhadap kudeta militer Mesir 2013 tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit yang pernah dialami Turki pada masa lalu. Partai berbasis Islam pernah beberapa kali dibubarkan dan pernah juga memenangkan pemilu di Turki, akan tetapi tidak berapa lama kemudian muncul penolakan dan sentimen militer pada pemerintah yang akhirnya berujung pada kudeta. AKP menilai intervensi militer dalam pemerintahan bisa menghambat dan berpeluang menumbangkan demokrasi. Pada pernyataannya, Perdana Menteri Turki, Erdogan menyatakan bahwa:

“Kudeta itu jahat. Kudeta mengorbankan rakyat, masa depan, dan demokrasi. Saya ingin ini diungkapkan oleh semua orang dengan keberanian. Saya terkejut dengan sikap Barat. Parlemen Eropa mengabaikan nilai-nilainya sendiri dengan tidak menyebut intervensi militer di Mesir sebagai kudeta.”

(Ariefyanto, 2013)

Disamping itu, Perdana Menteri Erdogan menyatakan menentang dan tidak akan menghormati pemerintahan hasil kudeta militer. Sebagaimana dinyatakannya:

“Turkey is not against the Egyptian people but against the coup leaders. I will never respect those who come to power through military coups.” (Tim Redaksi, 2013 b).

Penolakan Pemerintah Turki terhadap kudeta militer Mesir bukan berarti Pemerintah Turki melawan rakyat Mesir, tetapi Pemerintah Turki melawan para pemimpin kudeta. Kudeta Militer Mesir 2013 lebih terkesan didorong oleh keinginan untuk menghancurkan dan membatasi aspirasi dari kelompok ataupun partai politik tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari penahanan Presiden Mesir yaitu Muhammad Mursi dan pejabat-pejabat penting dari partai pemenang pemilu 2012 yaitu partai FJP, pasca pengumuman penurunan Presiden Mursi.

Faktor-Faktor Pertimbangan Pilihan

Sesuai dengan konsep yang penulis gunakan dalam penulisan ini, yaitu konsep pengambilan keputusan Richard C. Snyder, bahwa suatu pilihan yang diambil dapat dianalisis dari adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Dua faktor tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Turki dalam memutuskan sikap menolak atau menentang kudeta militer Mesir tahun 2013.

Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi Keputusan Pemerintah Turki

(a) Kedekatan hubungan antara Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) dengan Ikhwanul Muslimin Mesir

Penolakan kudeta militer Mesir tahun 2013 oleh Turki tidak bisa dilepaskan dari kedekatan hubungan antara AKP dengan partai pemenang pemilu di Mesir yaitu *Freedom and Justice Parti* (FJP). Kedua partai ini sama-sama lahir dari semangat keislaman. AKP dilatarbelakangi dengan partai pendahulunya, yaitu Partai Refah. Sedangkan FJP dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Ada anggapan yang menyatakan bahwa AKP merupakan representasi dari ideologi politik Ikhwanul Muslimin, mengingat dekatnya hubungan emosional dan spiritual pemimpin AKP dengan FJP. Kedua partai ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin melepaskan belenggu kediktatoran dan berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengakomodir nilai-nilai keislaman (Arslantas, 2013: 129).

Anggapan kedekatan tersebut dapat ditelusuri sejak tanggal 8 Februari 2011 sebelum rezim Husni Mubarak “jatuh”, salah satu petinggi Ikhwanul Muslimin Mesir, Ashraf Abdel Ghaffar bertolak menuju Turki. Kepergiannya ke Turki menjadi manuver politik penting bagi gerakan Ikhwan Mesir dalam rangka mengakhiri “cengkeraman” Husni Mubarak selama tiga dasawarsa. Ghaffar meminta suaka politik kepada Pemerintah Turki dan tinggal di Turki hingga rezim Husni Mubarak tumbang oleh aksi protes rakyat. Ghaffar memuji peran yang

dimainkan Pemerintah Turki dalam mendorong demokratisasi di Timur Tengah. Ia berjanji di hadapan awak media Turki akan menjadikan AKP sebagai model Mesir pasca rezim Husni Mubarak lengser (Dzakirin, 2012: 224)

Dari kedekatan tersebut, AKP mendukung penuh pemerintah Presiden Mursi. Hal tersebut dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Turki kepada Pemerintahan Mursi di awal masa jabatannya agar segera beranjak dari krisis ekonomi akibat revolusi 2011. Bantuan yang diberikan oleh Turki yaitu Perdana Menteri Erdogan mengajak Sekitar 250 pengusaha Turki pada kunjungannya ke Mesir dan telah menginvestasikan hampir \$ 2 milyar di Mesir baik berupa perusahaan tekstil, retail, makanan dan konstruksi untuk perbaikan negara Mesir (Karamuk, 2012).

(b) Dominasi Kader AKP Di Parlemen Turki

Kemenangan AKP dimulai pada tahun 2002. Sejak saat itu, AKP mulai menduduki kursi parlemen dengan jumlah yang cukup signifikan. Kemenangan tersebut terus berlanjut sampai pada pemilu terakhir yang dilaksanakan, yaitu pada tahun 2011. Pada pemilu 2011, AKP memperoleh 327 dari total 550 kursi di parlemen (Thorp, 2011). Jumlah tersebut melebihi setengah dari jumlah total kursi yang ada di parlemen.

Penguasaan kader AKP yang duduk di parlemen memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan luar

negeri Turki. Terlebih, baik Presiden ataupun Perdana Menteri Turki berasal dari kader AKP, menjadikan kepentingan AKP seperti tanpa halangan untuk diadopsi menjadi kebijakan negara. Pada mekanisme pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kemudian oleh Perdana Menteri dan diteruskan ke Parlemen, dalam setiap tahapannya, kader AKP mendominasi. Dominasi kader AKP tersebut mempermudah pengkondisian kebijakan menolak dan menentang kudeta militer Mesir 2013.

(c) Perubahan Doktrin Politik Luar Negeri Turki

Perubahan doktrin politik luar negeri Turki yaitu perubahan yang dulunya lebih condong ke Barat berganti condong ke wilayah sekitar (regionalis) yang lebih dikenal dengan sebutan *Strategic Depth and Zero Problem*, yaitu suatu pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki yang lebih menitikberatkan pada hubungan yang seimbang dengan negara-negara di sekitarnya. Dengan demikian, strategi politik luar negeri Turki yang baru menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan dengan keterbukaan dan penerapan politik *soft power* kepada negara tetangga. Arah dan orientasi politik luar negeri ini telah secara signifikan juga telah mengubah sikap politik regional.

Melalui doktrin politik luar negeri tersebut, Turki kembali menjalin hubungan luar negeri yang lebih hangat dengan negara-negara yang dulu menjadi seterunya, seperti Rusia, Armenia, Yunani. Selain itu Turki memperluas hubungan kerjasama diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah (Toledano, 2011). Turki menjadi kiblat baru independensi dan harga diri masyarakat Muslim di Timur Tengah.

Turki yang sebelumnya menjadi halangan dalam hubungan Timur Tengah dan Barat, kini justru memainkan peran katalis bagi kedua belah pihak. Turki berambisi untuk menjadi aktor utama dalam melakukan transformasi demokrasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Turki berupaya untuk membangun kepercayaan politik di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Implikasi dari doktrin politik luar negeri Turki bagi kawasan Timur Tengah yaitu terletak pada independensi dan keleluasaannya dalam memformulasi kepentingan dan kebijakan luar negeri Turki. Politik luar negeri Turki bergeser dari strategi isolasionis menuju keterlibatan aktif (*politics of engagement*). Perubahan doktrin tersebut merefleksikan upaya Turki dalam meminimalisir konflik dan mendorong demokratisasi di kawasan Timur Tengah.

Sikap yang ditunjukkan oleh Turki pada kudeta militer Mesir tahun 2013 adalah satu bukti dari perubahan doktrin politik luar negeri Turki. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh Turki

tersebut merupakan implementasi dari doktrin yang tengah dianutnya, yaitu untuk lebih peduli terhadap wilayah sekitar dalam menegakkan demokrasi.

(d) Dukungan Rakyat Turki Terhadap Presiden Mesir: Muhammad Mursi

Sejak pengumuman pelengseran Presiden Mesir, Muhammad Mursi pada tanggal 3 Juli 2013, rakyat Turki memadati jalanan kota di Turki untuk menolak keputusan tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2013, anggota dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Solidaritas untuk Masyarakat Tertindas (*Mazlum-DER*), Pegawai Negeri Sipil -*Trade Union* (*Memur-Sen*) dan Konfederasi Serikat Pekerja Turki Estat Perdagangan (*Hak-İş*) berkumpul di depan kantor Kedutaan Mesir di kota Ankara dan memprotes kudeta militer dengan membawa spanduk anti kudeta (Tim Redaksi, 2013 c). Pada hari yang lain, tetap di kota Ankara, di depan kedutaan Mesir dan Amerika Serikat, sekitar 3.000 pengunjung rasa melakukan doa bersama untuk para korban kudeta Mesir. Lebih dari 1.000 pengunjung rasa berkumpul di depan masjid Istanbul, mereka mengutuk sikap yang dilakukan oleh Militer Mesir (Akyol, 2013).

Penolakan rakyat Turki terhadap kudeta militer Mesir 2013 tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga melalui media sosial internet. Dukungan rakyat Turki kepada Mursi di media sosial semakin kuat dengan adanya *hashtags* *#TurkeyWithMorsi* di Twitter. *Hashtags* tersebut sempat menjadi *tranding topic* di Turki (Zalewski, 2013).

Dukungan rakyat Turki kepada Presiden Mesir, Muhammad Mursi memperkuat bukti di lapangan bahwa penolakan terhadap kudeta militer Mesir 2013 tidak hanya di kalangan pejabat pemerintahan Turki, akan tetapi penolakan juga terjadi di kalangan *grassroot*; rakyat Turki. Hal tersebut memberikan penekanan pada pemerintah Turki untuk menolak kudeta militer Mesir 2013.

(e) Faktor Sejarah

Kudeta militer pernah terjadi empat kali di Turki. Pertama pada tahun 1960 yaitu pada saat pemerintahan Adnan Manderes, kedua pada tahun 1971 ketika jabatan Perdana Menteri diduduki oleh Sulayman Demiral, ketiga pada tahun 1980 dan keempat yaitu pada tahun 1997 ketika pemerintahan diduduki oleh Partai Refah. Kudeta tersebut dilakukan oleh militer Turki dengan alasan ingin menyelamatkan negara dan membuat Turki menjadi lebih baik. Selain itu, militer Turki beralasan ingin memurnikan semangat revolusi kemerdekaan Turki tahun 1924. Namun demikian, selama kurun waktu tersebut keadaan Turki justru tidak kunjung stabil. Kebebasan dalam berkeyakinan selalu ditekan, perekonomian negara tidak kunjung mandiri, krisis tidak bisa dihindari dan kesejahteraan rakyat belum terpenuhi dan memadai. Berikut pernyataan dari Perdana Menteri Erdogan tentang kepedihan atas kudeta Militer Turki pada masa lalu:

"Each military coup, with no exception, has caused Turkey to lose decades. Each

military coup has paralyzed Turkish economy. Each military coup has caused the country, nation and young generations to pay heavy prices".(Tim Redaksi, 2013 d).

Pengalaman sejarah tersebut menjadi pendorong Turki untuk menolak kudeta militer Mesir tahun 2013. Turki tidak menginginkan pengalaman pahit yang pernah terjadi di Turki menimpa negara lain terlebih negara tersebut ada ikatan kedekatan sejarah dan emosi. Karena pada dasarnya kudeta hanya akan berakibat buruk baik dari segi politik ataupun ekonomi yang akan berakibat pada kesengsaraan rakyat.

Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keputusan Pemerintah Turki

(a) Presiden Mursi Terpilih Secara Demokratis

Pemilu tahun 2012 adalah pemilu demokratis yang pertama kali dalam sejarah Mesir. Pada pemilu tersebut Muhammad Mursi memenangkan pemilu selama dua putaran berturut-turut. Pada putaran pertama Mursi memperoleh suara sebanyak 5.764.952 pemilih atau setara dengan 24.78% dari tiga belas kandidat. Sedangkan pada putaran kedua Mursi memperoleh suara sebanyak 13.230.131 atau setara dengan 51.73% dari dua kandidat (Tim Redaksi, 2012 a).

Melihat proses terpilihnya Mursi dengan cara demokratis dan kudeta penurunannya, Perdana Menteri Erdogan mengatakan:

"I have consistently said at international platforms that I do not accept Sisi as the president. Today, I am also saying the same thing. To me, the president of Egypt is not Sisi, it is still Morsi. It is not possible for us who believe in democracy to accept such a coup". (Moore, 2015).

Menurut pernyataan di atas, Turki sangat menentang kudeta Militer Mesir tahun 2013. Menurut Turki, suatu keputusan yang dihasilkan oleh suara rakyat (pemilu) tidak dapat dibatalkan atau digugurkan dengan cara apapun kecuali dikembalikan lagi kepada rakyat. Suara rakyat adalah hal yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

(b) Militer Mesir Menggunakan Cara Represif Untuk Menurunkan Presiden Mursi

Penurunan Muhammad Mursi dari jabatan Presiden Mesir pantas disebut sebagai kudeta militer karena dilakukan dengan menggunakan cara represif. Awal mula kudeta militer dilakukan ketika ada demonstrasi besar-besaran pada tanggal 30 Juni 2012. Aksi tersebut terdiri dari kubu pro maupun kontra dengan Pemerintah Mesir. Kejanggalan yang dilakukan oleh aparat keamanan yaitu, aparat keamanan yang semestinya bersikap di tengah, netral dan menjaga situasi dan keamanan para pendemo agar tidak bentrok, justru lebih memihak pada tuntutan oposisi yang terdiri dari kelompok-kelompok liberal, sekuler, komunis, dan nasionalis.

Keberpihakan sikap militer dapat dilihat dari aksi pembubaran yang dilakukannya pada pendukung pemerintah tetapi tidak pada kubu oposisi. Pembubaran yang dilakukan disertai dengan sikap represif, seperti yang terjadi di Nahdhoh Square, Rab'ah Adawiyah, Alexandria, Minya, Assiut, Fayoum dan Suez, serta di provinsi Buhayra dan Beni Su (Hutapea, 2013).

Salah satu tindakan represif dilakukan oleh militer Mesir pada waktu jamaah Sholat Subuh pada tanggal 8 Juli 2013. Sebanyak 53 orang tewas termasuk 5 anak-anak dan 2 bayi dan pada tanggal 27 Juli sebanyak 74 orang. Rata-rata para korban terkena luka tembakan di bagian dada, leher ataupun kepala (Mansfield dan Ali, 2013). Tindakan represif militer Mesir terhadap rakyat tidak dapat dibenarkan oleh Turki karena tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan juga tidak sesuai dengan semangat Turki dalam menegakkan nilai demokrasi.

(c) Kebijakan Presiden Mesir, Muhammad Mursi Sejalan dengan Turki untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina

Masa pemerintahan Muhammad Mursi sangat berbeda dengan pemerintahan Husni Mubarak. Pada masa kepemimpinan Husni Mubarak arah kebijakan luar negeri Mesir lebih ke arah Amerika Serikat (AS), Israel dan Barat (negara-negara Eropa). Pada masa pemerintahan Muhammad Mursi, Mesir tidak lagi mendekatkan diri kepada AS dan Barat tetapi mendekatkan diri kepada negara-negara Arab dan

negara-negara Islam lainnya. Salah satu negara yang menjadi fokus Mesir adalah Palestina (Iskandar, 2014).

Isu Palestina menjadi isu utama dalam politik luar negeri Mesir. Muhammad Mursi berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan berupaya penyelesaian konflik secara adil agar mencapai tujuan yang diacu. Selama bangsa Palestina tidak mencapai hak-hak mereka, maka perwujudan perdamaian dan pembentukan negara Palestina tidak akan mungkin terealisasi. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Mursi pada KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bahwa, perwujudan perdamaian di kawasan menuntut penyelesaian masalah Palestina (Hapsari, 2013).

Turki di bawah pimpinan AKP melihat bahwa kemenangan Presiden Muhammad Mursi di Mesir akan membawa dampak positif bagi hubungan Turki-Palestina.. Hal tersebut dikarenakan, ketika Muhammad Mursi memimpin Mesir, perbatasan Mesir-Palestina kembali dibuka, dan rakyat Palestina diizinkan untuk memasuki Mesir tanpa visa. Perbatasan Rafah dibuka selama 12 jam, dan dibuka enam kali dalam seminggu dan penduduk Gaza yang yang berusia antara 18-40 tahun harus melapor untuk dapat melintasi perbatasan tersebut, sementara wanita dan anak-anak tidak perlu melapor (Tim Redaksi, 2012 b). Erdogan selaku Perdana Menteri Turki dengan tegas menyatakan bahwa persoalan

bangsa Palestina menjadi urusan domestik rakyat Turki (Tim Redaksi, 2009)

(d) Tindakan Represif Militer Mesir Kurang Mendapatkan Perhatian dari Negara-negara Dunia

Sistem demokrasi adalah sistem yang paling populer di negara-negara dunia, terutama di negara Barat. Semua negara menyatakan dirinya bertindak atas nama kebebasan dan kehendak rakyat. Sebagai pendukung dan pembela sistem demokrasi, seyogyanya, negara-negara di dunia ketika melihat pelanggaran terhadap mekanisme demokrasi, segera mengambil tindakan yang konkret untuk mengingatkan ataupun meluruskan. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan, Libya ataupun Irak.

Pada kasus Mesir, hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh negara-negara besar di dunia. Amerika Serikat yang terkenal dengan negara paling demokratis tidak memberikan sikap yang tegas. Begitu juga Inggris, Perancis, Australia ataupun Indonesia. Berbeda dengan Turki, Turki segera menentukan sikap tegas untuk menolak kudeta militer Mesir dan meminta proses pergantian kekuasaan dikembalikan pada mekanisme yang sudah diujalakan, yaitu pemilu. Dalam pertemuan pers di Ankara Perdana Menteri Erdogan mengatakan:

“I am calling on Western countries. You remained silent in Gaza, you remained silent in Syria ... You are still silent on Egypt. So

how come you talk about democracy, freedom, global values and human rights”(Burch, 2013).

Kecepatan Turki dalam merespon kudeta militer di Mesir tahun 2013 diharapkan mampu menggugah kesadaran negara-negara Barat dan lainnya untuk mengikuti langkah yang ditempuh oleh Turki dalam menegakkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Implikasi Hubungan Turki dengan Mesir Pasca Kudeta

Setelah penolakan dan penentangan Pemerintah Turki terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir tahun 2013, hubungan Turki dengan Mesir mengalami ketegangan. Menanggapi sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Turki, maka Mesir memutuskan untuk memulangkan Duta Besar Turki yang berada di Mesir. Begitu juga dengan Pemerintahan Turki, memulangkan Duta Besar Mesir yang berada di Turki, artinya kedua negara mem-*persona non grata* kepada masing-masing Duta Besar (Tim Redaksi, 2013 e).

Pemutusan hubungan diplomatik tersebut berpengaruh pada kerjasama-kerjasama yang telah dan yang akan dilakukan oleh Turki dengan Mesir. Menurut Menteri Perencanaan dan Kerjasama Internasional Mesir, Ashraf al-Arabi, ketegangan politik antara Kairo dan Ankara telah menyebabkan penangguhan kesepakatan bantuan Turki kepada Pemerintah Mesir sebesar \$ 1 miliar (Tim Redaksi, 2013c). Di bidang perdagangan dan transportasi,

sebuah perusahaan bus Turki membatalkan pengiriman 600 unit bus ke Mesir (Galal, 2013). Di samping itu Pemerintah Mesir sendiri memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian perdagangan bebas antara Turki dengan Mesir yang akan berakhir pada Maret 2015 (Doğan, 2013)

Sikap penolakan dan penentangan kudeta militer Mesir tahun 2013 oleh Turki, yang berujung pada ketegangan hubungan diplomatik antara Turki dengan Mesir bukan sesuatu yang perlu dikuatirkan bagi Turki. Hal tersebut tidak akan berdampak besar bagi Turki, karena dari segi politik, pertahanan, ekonomi dan teknologi Turki berada di atas Mesir. Sikap penolakan tersebut artinya bisa dikatakan sebagai ancaman Turki kepada Mesir untuk segera mengembalikan keputusan legal, yang sesuai dengan kehendak rakyat yaitu hasil pemilu 2012.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, penolakan Pemerintah Turki di bawah *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) terhadap kudeta militer Mesir tahun 2013 dilatarbelakangi oleh pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor pertimbangan internal yaitu: 1) kedekatan hubungan antara *Adalet Ve Kalkinma Partisi* dengan *Ikhwanul Muslimin* Mesir, 2) dominasi kader AKP di Parlemen, 3) perubahan doktrin politik luar negeri Turki sejak *Adalet Ve Kalkinma Partisi* memimpin Turki, 4) dukungan rakyat Turki untuk menolak

kudeta militer Mesir, 5) pengalaman sejarah empat kali kudeta yang dialami oleh Turki. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya yaitu; 1) mekanisme pemilihan Presiden Mursi yang demokratis, 2) sikap militer yang represif terhadap pengunjuk rasa pendukung Presiden Mursi, 3) Turki sependapat dengan kebijakan Mursi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, 4) tindakan represif militer Mesir kurang mendapatkan perhatian dari negara-negara dunia.

Dari beberapa faktor baik secara internal ataupun eksternal maka penolakan Turki atas kudeta militer Mesir tahun 2013 adalah pilihan yang paling rasional. Hal tersebut di samping untuk menjaga stabilitas perpolitikan di dalam negeri Turki, juga untuk meyakinkan kepada negara-negara dunia bahwa Turki merupakan negara demokrasi dan berusaha menjadi penegak nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arslantas, Duzgun. 2013. *The Political Analysis of the Muslim Brotherhood and the AKP Tradition: Why did Turkish Model Fail in Egypt? A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University*. Diakses dari etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616419/index.pdf. 16 Februari 2015
- Barkey, Henri J. 2011 *Turkish Foreign Policy and Middle East. CERl Strategy Papers*.
- Dzakirin, Ahmad. 2012. *Kebangkitan Pos-Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adicitra Intermedia.

- Jensen, Lloyd. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Perwita Banyu, Anak Agung dan Yani, Mochamad, Yanyan. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Snyder, Richard C., Bruck, H.W. and Sapin, Burton (eds).1962. *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the Study of International Politics*. New York: The Free Press.
- Tashjian, Yeghig. 2012. *From Conceptualization to Implementation and Revaluation: Turkey's "Strategic Depth" in the MENA region*, diakses dari www.strategicoutlook.org 10 Oktober 2014
- Varma, SP. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Internet**
- Ariefyanto, M Irwan. 2013. *PM Turki Kecam Kudeta Militer di Mesir*. <http://www.republika.co.id/berita/internasion-al/timur-tengah/13/07/06/mpibwk-pm-turki-kecam-kudeta-militer-di-mesir>. 30 Oktober 2014
- Akyol, Mutafa. 2013. *Turkey Condemns Egypt's Coup*. <http://www.almonitor.com/pulse/originals/2013/08/reasons-turkey-against-egypt-coup.html>. 14 Februari 2015
- Burch, Junathon. 2013. *Turkish PM calls for U.N. Security Council to convene on Egypt*. <http://www.reuters.com/article/2013/08/15/us-egypt-protests-turkey-idUSBRE97E0C520130815>. 5 Juli 2015
- Doğan. 2013. *Egypt to unilaterally cancel trade agreement signed with Turkey during Morsi rule*. <http://www.hurriyetdailynews.com/egypt-to-unilaterally-cancel-trade-agreement-signed-with-turkey-during-morsi-rule.aspx>
- Galal, Namir. 2013. *Turkey freezes deal to import buses to Egypt: media*. <http://www.egyptindependent.com/news/turkey-freezes-deal-import-buses-egypt-media> 16 Februari 2015
- Hapsari, Endah. 2013. *Mursi: Mesir Terus Dukung Palestina*. <http://www.republika.co.id/berita/internasion-al/global/13/02/07/mhtlba-mursi-mesir-terus-dukung-palestina> 16 Februari 2015
- Hutapea, Rita Uli. 2013. *Usai Pembantaian Pendukung Morsi, Kerusuhan di Mesir Meluas*. <http://news.detik.com/read/2013/08/15/144611/2330800/1148/usai-pembantaian-pendukung-morsi-kerusuhan-di-mesir-meluas>. 15 Februari 2015
- Iskandar. 2014. *Dukungan Mesir Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina 2011-2013*. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2496/2430> 16 Februari 2015
- Karamuk, Oguz. 2012. *Will Erdogan's Policies Endanger Turkish Investments in Egypt?*. <http://www.al-monitor.com/pulse/fa/business/2013/07/turkey-businessmen-egypt-fear-erdogan-support-morsi.html#>. 30 Oktober 2014
- Mansfield, Michael and Ali, Tayab. 2013. *Egypt's military will not get away with human rights abuses*. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/14/egypt-military-human-rights-abuses>. 14 Desember 2014
- Moore, Jack. 2015. *Turkey's Erdoğan: 'Morsi is Egypt's president, not Sisi'*. <http://europe.newsweek.com/turkeys-erdo-morsi-egypts-president-not-sisi-327640>. 4 Juli 2015

- Thorp, Arabella. 2011. *Turkey's 2011 elections and beyond*. www.parliament.uk/briefing-papers/SN06035 .pdf. 15 Februari 2015.
- Toledano, Ehud. 2011. *The AKP's New Turkey*. <http://www.hudson.org/research/9846-the-akp-s-new-turkey>. 3 Juli 2015
- Tim Redaksi. 2009. *What Turkish PM, Tayyip Erdogan told Shimon Peres in Davos*. http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_29547.shtml. 16 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2012 a. *Muslim Brotherhood's Mursi declared Egypt President*. <http://www.bbc.com/news/world-18571580>. 14 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2012 b. *Gaza: Egypt opens border ahead of Eid holiday*. <http://www.arabnews.com/gaza-egypt-opens-border-ahead-eid-holiday>. 4 Juli 2015
- Tim Redaksi. 2013 a. *Turkey and Egypt losing ground as diplomatic dispute grows*. http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-and-egypt-losing-ground-as-diplomatic-dispute-grows_332723.html. 1 November 2014
- Tim Redaksi. 2013 b. *Erdogan retaliates and raises Adawiya four fingers symbol*. <https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/8485-erdogan-retaliates-and-raises-adawiya-four-fingers-symbol>. 2 Juli 2015
- Tim Redaksi. 2013 c. *Unions hold anti-coup protest outside Egyptian Embassy in Ankara*. http://www.todayszaman.com/latest-news_unions-hold-anti-coup-protest-outside-egyptian-embassy-in-ankara_320101.html. 3 Juli 2015
- Tim Redaksi. 2013 d. *Turkey PM blasts Egypt 'coup' as enemy of democracy*. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4401290,00.html>. 4 Juli 2015
- Tim Redaksi. 2013 e. *Turkey and Egypt losing ground as diplomatic dispute grows*. http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-and-egypt-losing-ground-as-diplomatic-dispute-grows
- key-and-egypt-losing-ground-as-diplomatic-dispute-grows_332723.html. 1 November 2014
- Tim Redaksi. 2014. *Turkey's Erdogan refused sitting on table with Egypt's Sisi*. <http://www.worldbulletin.net/news/145266/turkeys-erdogan-refused-sitting-on-table-with-egypts-sisi>. 1 November 2014
- Zalewski, Piotr . 2013. *Did Egypt Experience a Coup? The West May Not Be Sure, but Turkey is*. <http://world.time.com/2013/07/08/did-egypt-experience-a-coup-the-west-may-not-be-sure-but-turkey-is/>. 3 Juli 2015